

KECAMATAN NGADIROJO



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Ngadirojo . Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ngadirojo, 18 Juli 2025



NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19720520-199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	PENDAHULUAN	
I.1	LATAR BELAKANG	4
I.2	LANDASAN HUKUM	4
I.3	MAKSUD DAN TUJUAN	6
I.4	SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II	8
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	18
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	20
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	20
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	21
BAB IV	PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 188/076/408.53/2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPERANGKAT DAERAH dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Ranwal Renja Perangkat daerah Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ; (Lembaran Negara RI tahun 204 Nomor : 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembarab Negara RI Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaran Neraga RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6322;
12. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
13. Permendagri Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat aerah provisni dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangaunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah entang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Sireta Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
18. Peraturan Meenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPERANGKAT DAERAH) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Nomor : 188/3001/408.53/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat daerah tahun 2025 Kabupaten Pacitan

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ngadirojo pada tahun 2025.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ngadirojo pada Tahun 2025.

Tujuan

1. Mengsinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirojo tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025.

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya. Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngadirojo dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2025

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16	
1	701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	0	0	70,20	2.373.879.768	70,20	2.654.783.919	0	499.796.290	72,75	634.288.372					72,75	1.464.069.658	103,63%	55,15%	143,15	2.295.436.656,00	0	0	Kecamatan Ngadirejo
	701.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23	0	23	13.835.555	23	29.163.423	11	120.000	0	0					11	120.000	47,83%	0,41%	46	9.820.950,00	200	0	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	14	8.337.110	19	27.994.827	10	120.000	0	0					10	120.000	52,63%	0,43%	14	6.512.900,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	1	1.202.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	1	1.154.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	1	865.245											0	0	0,00%	0,00%	1	483.600,00	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	1	892.245											0	0	0,00%	0,00%	1	844.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	1	853.395											0	0	0,00%	0,00%	1	482.800,00	0	0	

701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	4	820.095								0	0	0,00%	0,00%	4	343.150,00	0	0	
701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	1	864.735	4	1.168.596	1	0	0	0		1	0	25,00%	0,00%	1	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	100	60,43					F
Predikat kinerja(%)																	Sangat Tinggi	Rendah		7	7		
701.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59	0	59	1.939.435.217	59	1.946.611.926	13	402.426.005	8	592.887.602		21	995.313.607	35,59%	51,13%	118	1.816.979.655,00	200	0	
701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	20	1.918.886.592	21	1.922.705.822	21	402.306.005	21	592.887.602		21	995.193.607	100	93,84	20	1.800.587.855,00	0	0	
701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	1	886.080			0	0	0	0		0	0	100	84,6	1	749.650,00	0	0	
701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	1	1.141.005			0	0	0	0		0	0	100	0	1	0	0	0	
701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		0	12	17.003.450	24	21.239.920	6	120.000	1	0		7	120.000	100	86,71	12	14.743.000,00	0	0	
701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	12	1.518.090	12	2.666.184	3	120.000,00	1	0		4	120.000	100	59,23	12	899.150,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	100	64,88					F
Predikat kinerja(%)																	Sangat Tinggi	Rendah		5	5		

2	701	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100	0	87	23.764.620	96	31.317.760	92,17	3.834.000	94,66	4.490.000	0	4.582.500,00	86,92	12.242.900,00	86,92	22.893.500,00	100,02	84,87	170,33	22.893.500,00	170,33	0	Kecamatan Ngadiproj																					
	701.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	Laporan	12	0	12	11.882.310	12	15.515.752	3	2.700.000	3	4.490.000					12	8.654.200,00	100	72,83	24	8.654.200,00	200	0																						
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		0	1	11.882.310	12	15.515.752	3	2.700.000	3	4.490.000					6	8.654.200,00	100	72,83	1	8.654.200,00	0	0																						
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	72,83																									F	
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang																										
	701.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	Bulan	12	0	12	15.091.700	12	15.802.008	3	1.134.000	3	0					12	14.239.300,00	100	94,35	24	14.239.300,00	200	0																						
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	12	15.091.700	12	15.802.008	3	1.134.000	3	0					6	14.239.300,00	100	94,35	12	14.239.300,00	0	0																						
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	94,35																										F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																										
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100	83,59																										
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Tinggi																										
3	701	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	%	100	0	100	287.735.080	100	249.398.496	25	24.459.000	50	66.830.600					100	271.018.400,00	100	94,19	200	271.018.400,00	200	0	Kecamatan Ngadiproj																					
	701.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	18	0	18	287.735.080	18	249.398.496	5	24.459.000	4	66.830.600					18	271.018.400,00	100	94,19	36	271.018.400,00	200	0																						
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat		0	4	30.820.815	4	35.369.884	4	14.184.000	0	0					4	21.410.650,00	100	69,47	4	21.410.650,00	0	0																						
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	12	256.914.265	12	214.028.612	3	10.275.000	3	66.830.600					6	249.607.750,00	100	97,16	12	249.607.750,00	0	0																						
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	83,32																										F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Tinggi																										
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100	94,19																										
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																										

4	701	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100	0	100	356.597.420	100	203.517.152	25	25.950.000	25	46.614.000	100	330.996.725,00	100	92,82	200	330.996.725,00	200	0	Kecamatan Ngadirojo
	701.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	0	12	356.597.420	12	203.517.152	3	25.950.000	3	46.614.000	6	330.996.725,00	100	92,82	24	330.996.725,00	200	0	
	701.04.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Desa	Laporan		0	12	356.597.420	12	203.517.152	3	25.950.000	3	46.614.000	6	330.996.725,00	100	92,82	12	330.996.725,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	92,82			F	
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		100	92,82	1	1		
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
5	701	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%	0	0	100	28.151.940	100	14.920.300	0	0	0	0	100	22.348.150,00	100	79,38	200	22.348.150,00	0	0	Kecamatan Ngadirojo
	701.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Desa	18	0	18	28.151.940	18	14.920.300	0	0	0	0	18	22.348.150,00	100	79,38	118	22.348.150,00	655,56	0	
	701.05.2.01.0005	Pengangan Koordinik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	12	28.151.940	12	14.920.300	0	0	0	0	0	22.348.150,00	100	79,38	12	22.348.150,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	79,38			F	
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Tinggi				
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		100	79,38	1	1		
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Tinggi				
6	701	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	%	100	0	100	115.208.755	100	167.428.576	25	13.656.000	25	19.049.000	100	113.051.560,00	100	98,13	125	113.051.560,00	125	0	Kecamatan Ngadirojo
	701.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	Desa	18	0	18	115.208.755	18	167.428.576	5	13.656.000	5	19.049.000	18	113.051.560,00	100	98,13	118	113.051.560,00	655,56	0	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	12	35.756.220	12	35.272.852	3	8.694.000	3	0	6	34.865.300,00	100	97,51	12	34.865.300,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0	12	36.799.620	12	36.031.968	3	3.042.000	3	0	6	36.549.460,00	100	99,32	12	36.549.460,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		0	12	42.652.915	12	96.123.756	3	1.920.000	3	19.049.000	6	41.636.800,00	100	97,62	12	41.636.800,00	0	0	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	98,15			F	
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		100	98,13	3	3		
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		99,4	91,02				
																Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
																Total		3.188.546.973,00		3.055.744.991,00			
																Persentase Realisasi Anggaran				95,84%			
																Predikat				Sangat Tinggi			
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan Adanya konsistensi dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya revisi/penambahan/pergeseran anggaran antar belanja maupun antar kegiatan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan program/kegiatan serta rincian belanja yang sudah ada untuk mengakomodir kebutuhan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya : Diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat serta mengevaluasi program/kegiatan ditahun sebelumnya serta tetap konsisten dalam pelaksanaan Renja ditahun berikutnya</p>																							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kreteria) dan SPM ,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,Serta Tata Kerja Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:
 1. Desa Sidomulyo
 2. Desa Hadiwarno
 3. Desa Hadiluwih
 4. Desa Tanjungpuro
 5. Desa Pagerejo
 6. Desa Wiyoro
 7. Desa Ngadirojo
 8. Desa Bogoharjo
 9. Desa Cokrokembang
 10. Desa Bodag
 11. Desa Tanjunglor
 12. Desa Nogosari
 13. Desa Cangkring
 14. Desa Wonoadi Kulon
 15. Desa Wonoadi Wetan
 16. Desa Wonokarto
 17. Desa Wonosobo
 18. Desa Wonoasri
3. Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai peraturan perundang undangan ;
 - b) Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Pengoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau

Kelurahan;

- h) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
5. *Selain melaksanakan tugas , Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;*
6. *Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.*

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- 1. Sekretariat;
- 2. Seksi Pelayanan Umum;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- 5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan ;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Program,Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c. Melakukan pengelolaan data;
- d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan admijistrasi keuangan;
- f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akutansi dan pelapoan keuangan;
- g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

- c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik Daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik Tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta mendaftarkan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertahanan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

- i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah Kecamatan dan kerja sama antar kecamatan
- j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
- k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan permusyawaratan desa;
- q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya
- t. Melaporkan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKSI SOSIAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Uraian Tugas Seksi Sosial sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;
- f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan Kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan / atau Kelurahan
- o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau Kelurahan;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan/ atau Kelurahan ;
- r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan ;
- s. Meksanakan pemberdyaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- â. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), serta lingkungan eksternal dimana peluang (opportunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Ngadirojo. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Ngadirojo sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa hambatan, antara lain : (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif :

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo ditentukan, isu- isu strategis yaitu sebagai berikut :

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan; (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Cooperate Social Resposipilioty (CSR) , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3). Meningkatnya kualitas pelayanan secara prima adalah faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang akan mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pelayanan di daerah Kecamatan Ngadirojo. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. (5). Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Ngadirojo dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, di mana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Ngadirojo dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Ngadirojo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

Tujuan Renja PERANGKAT DAERAH Kecamatan Ngadirojo adalah terselenggaranya tata kelola di kecamatan Ngadirojo yang baik. Dengan sasaran meningkatnya tata kelola Kecamatan Ngadirojo yang transparan dan akuntabel. Dengan tujuan dan sasaran Operasional Perangkat Daerah tersebut perangkat daerah memiliki indikator kinerja :

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah dengan program prioritas pembangunan program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah dengan program prioritas pembangunan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Tingkat disiplin aparatur dengan program prioritas pembangunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.3 Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yaitu :

1	2	3	4
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Perencanaan, PENGANGGARAN, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	2	3	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1	2	3	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHA		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1	2	3	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya terkait dengan :
1. Pencapaian Visi misi kepala daerah
 2. Pencapaian SDGs
 3. Pengentasan kemiskinan
 4. Pencapaian NSPK dan SPM
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 6. Pengembangan daerah terisolir
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Jumlah program dan jumlah kegiatan Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 program, 12 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebut menyebar di semua Seksi .
Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
Total Pagu anggaran tahun 2025 Perubahan Rp 3.124.459.308,00
- c. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal maka dilaksanakan Renja perubahan.
- d. RKPD baik jenis program / kegiatan , pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Ngadirojo dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2025 di Kecamatan Ngadirojo dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


CAMAT NGADIROJO
NANANG HARDWIJO, S.Sos.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19720520 199203 1 010

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERINGKAT DAERAH KECAMATAN NGADIROJO KAB. PACITAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		KECAMATAN NGADIROJO								2.785.566.203,00	3.321.366.203,00	3.124.459.308,00	338.893.105,00								0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.785.566.203,00	3.321.366.203,00	3.124.459.308,00	338.893.105,00								0,00		
	7.01	KECAMATAN							2.785.566.203,00	3.321.366.203,00	3.124.459.308,00	338.893.105,00								0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.371.034.802,00	2.654.783.919,00	2.550.517.366,00	-2.371.034.802,00								0,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.723.423,00	29.163.423,00	8.653.423,00	-10.070.000,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					19 Dokumen	19 Dokumen	17.554.827,00	27.994.827,00	8.144.827,00	-9.410.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	1.168.596,00	1.168.596,00	508.596,00	-660.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.985.298.209,00	1.946.611.926,00	1.870.397.414,40	-114.900.794,60			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	1.961.392.105,00	1.922.705.822,00	1.859.762.909,00	-101.629.196,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD					47 Laporan	47 Laporan	21.239.920,00	21.239.920,00	9.528.321,40	-11.711.598,60	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																				
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					12 Dokumen	12 Dokumen	2.666.184,00	2.666.184,00	1.106.184,00	-1.560.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	24.994.200,00	160.337.000,00	160.337.000,00	135.342.800,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan					2 Paket	2 Paket	24.994.200,00	160.337.000,00	160.337.000,00	135.342.800,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	KECAMATAN NGADIROJO	

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	57.136.900,00	40.036.900,00	28.991.700,00	-28.145.200,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.549.400,00	16.549.400,00	8.855.100,00	-7.694.300,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.809.700,00	11.809.700,00	11.809.700,00	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.777.800,00	11.677.800,00	8.326.900,00	-20.450.900,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	29.561.300,00	118.681.500,00	114.172.558,60	84.611.258,60			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	29.561.300,00	118.681.500,00	114.172.558,60	84.611.258,60	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	157.461.270,00	193.181.670,00	201.193.770,00	43.732.500,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.596.070,00	21.596.070,00	29.608.170,00	8.012.100,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.400.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	-21.700.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	106.465.200,00	163.885.600,00	163.885.600,00	57.420.400,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.859.500,00	166.771.500,00	166.771.500,00	68.912.000,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	64.266.700,00	133.178.700,00	133.178.700,00	68.912.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	33.592.800,00	33.592.800,00	33.592.800,00	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	31.817.760,00	31.317.760,00	22.125.260,00	-31.817.760,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.515.752,00	15.515.752,00	15.515.752,00	0,00			-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	12 Laporan	15.515.752,00	15.515.752,00	15.515.752,00	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	16.302.008,00	15.802.008,00	6.609.508,00	-9.692.500,00			-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	16.302.008,00	15.802.008,00	6.609.508,00	-9.692.500,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	116.677.513,00	249.398.496,00	239.985.296,00	-116.677.513,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	116.677.513,00	249.398.496,00	239.985.296,00	123.307.783,00			-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33.293.484,00	35.369.884,00	24.929.884,00	-8.363.600,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	83.384.029,00	214.028.612,00	215.055.412,00	131.671.383,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	98.987.252,00	203.517.152,00	182.472.896,00	-98.987.252,00							0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	98.987.252,00	203.517.152,00	182.472.896,00	83.485.644,00			-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					12 Laporan	12 Laporan	98.987.252,00	203.517.152,00	182.472.896,00	83.485.644,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN NGADIROJO

5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-					-	-	34.120.300,00	14.920.300,00	6.075.200,00	-34.120.300,00						0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-					-	-	34.120.300,00	14.920.300,00	6.075.200,00	-28.045.100,00						0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
								12 Laporan	12 Laporan	34.120.300,00	14.920.300,00	6.075.200,00	-28.045.100,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-					-	-	132.928.576,00	167.428.576,00	123.283.290,00	-132.928.576,00						0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-					-	-	132.928.576,00	167.428.576,00	123.283.290,00	-9.645.286,00						0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
								12 Dokumen	12 Dokumen	47.272.852,00	35.272.852,00	28.648.152,00	-18.624.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
								12 Dokumen	12 Dokumen	36.031.968,00	36.031.968,00	9.931.968,00	-26.100.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
								12 Laporan	12 Laporan	49.623.756,00	96.123.756,00	84.703.170,00	35.079.414,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
J U M L A H										2.785.566.203,00	3.321.366.203,00	3.124.459.308,00	338.893.105,00						0,00	